

POTENSI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH DENGAN METODE *DYNAMIC LOCATION QUOTIENT* VERSI BANK DUNIA

Oleh:
Endang Setiasih¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Regional economic potencies in Central Java Province is an interesting object to examine. Many regencies in the province has relied on agriculture sector be a primary income source in 2000, but, the sector has showed decreasing contribution in 2004. Beside that, new city raising, since 1999, has also affected to the structural economy changing because it leaded modern economic activity to stimulate regional income increasingly.

By Static Location Quotient (LQ), this research shows that some superior economic sectors has change in 2000 to 2004, among regencies and cities. The tendency of the changing has an implication of the growth of role in every sectors. relativly amona the reasions. Bv Dvnamic Location Quotient (•LO). thi: research shows some regions have lower LQ than others and coincide decreasing LQ value. If this empirical condition occurs in important sectors, it will has negative effect to economic condition of society. On the other side, some regions have higher LQ and positive LQ growth. It makes the economic sectors have positive potency and needs to keep improving by policy maker.

Keywords: *Static and Dinamic Location Quotient, potencies, regional*

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan otonomi yang lebih luas mengemuka, kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah semakin luas. Hal ini berarti datangnya era otonomi daerah memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan regional. Oleh karena itu para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

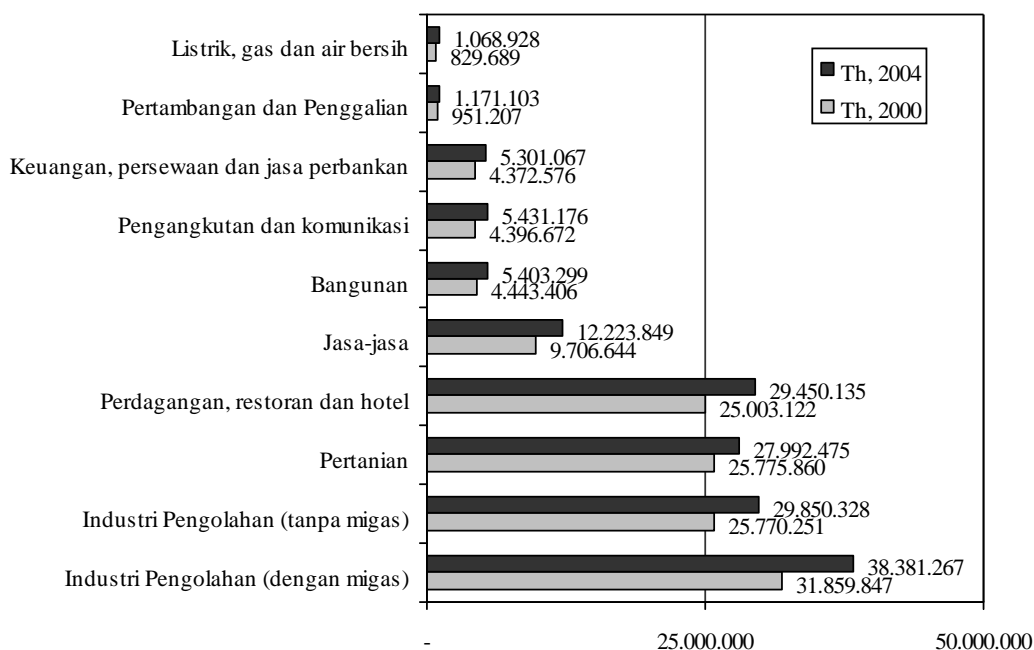
Setiap daerah tentu mempunyai potensi ekonomi yang tidak sama dengan daerah yang lain. Dengan kata lain masing-masing daerah cenderung mempunyai sektor-sektor perekonomian unggulan yang berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu model perencanaan ekonomi regional yang praktis dan mudah untuk dilaksanakan bagi daerah akan membantu untuk mendorong kemandirian dan pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Penelitian ini mengkaji potensi ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dengan menentukan sektor-sektor basis (unggulan). Hal ini penting karena menurut Kuncoro (2004) penentuan basis ekonomi merupakan salah satu tugas yang perlu dilakukan pada tahap pertama dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Di Propinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2004, pangsa sektor pertanian, industri

pengolahan dan perdagangan, restoran dan hotel masih mendominasi besaran PDRB Jateng. Hal ini terlihat dari Grafik 1. Pada tahun 2001, ke tiga sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi bagi PDRB lebih dari 76,5 triliun rupiah, atau sebesar 75,6% dari PDRB total. Ukuran share ini belum termasuk nilai PDRB dari sektor pengolahan minyak dan gas (migas). Jika migas diikut sertakan dalam komposisi pendukung industri pengolahan, ke tiga sekor ekonomi utama memberikan kontribusi sebesar 82,6 triliun rupiah dan share terhadap PDRB sebesar 77,0%. Di luar perhitungan pengolahan migas, 6 sektor ekonomi lain hanya menyumbang sekitar 24,4% dari PDRB total. Pada tahun 2004, meskipun ketiga sektor utama tersebut meningkat nilainya (menjadi 87,3 triliun rupiah), tetapi pangasanya terhadap PDRB menurun menjadi 74,0% (tanpa migas). Pada periode 2000 – 2004, ketiga sektor ekonomi utama Jateng menurun kontribusinya bagi PDRB sekitar 1,56%.

Sub sektor industri pengolahan minyak dan gas merupakan sektor ekonomi spesifik. Sub sektor ini memberikan kontribusi yang besar, sekitar 22,23% dari PDRB sektor industri pengolahan, atau berkisar 7,24% dari total PDRB Jateng tahun 2004. Dikatakan spesifik, karena aktivitas sub sektor ini hanya terdapat di Kabupaten Cilacap. Daerah kabupaten/kota lain di Jateng tidak memperoleh kontribusi secara langsung dalam perhitungan PDRBnya.



Grafik 1. PDRB Sektoral Jawa Tengah, 2000 dan 2004 (Berdasar Harga Konstan 2000)

Jika dibandingkan pangsa PDRB per sektor ekonomi di Jateng, pada tahun 2000 sektor pertanian memberikan kontribusi utama bagi PDRB (Grafik 2). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 25,46%. Pada tahun 2004, sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar telah bergeser pada sektor industri pengolahan. Pangsa dari masing-masing sektor ini terlihat menunjukkan penurunan. Kondisi ini berbeda dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memperlihatkan peningkatan pangasanya, dari 24,69% menjadi 24,98%.

Dari perubahan komposisi relatif besaran PDRB sektoral antar kabupaten/kota, penelitian akan melihat apakah suatu sektor-sektor ekonomi tertentu masih menjadi unggulan atau tidak di daerah tersebut. Rumusan Masalah yang diajukan adalah:

1. Sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor basis di setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah
2. Sektor-sektor ekonomi manakah yang tergolong memiliki potensi unggulan dan tidak berpotensi unggulan di setiap kota/kabupaten tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji perbandingan potensi ekonomi setiap sektor ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Lingkup sektor ekonomi yang menjadi kajian penelitian ini terdiri dari 9 sektor lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian (tanpa migas)
3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data-data PDRB 9 sektor tersebut yang meliputi 35 kabupaten dan kota di wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah (29 kabupaten dan 6 kota). Periode data adalah tahun 2000 sampai 2004.

Untuk mengidentifikasi subsektor-subsektor unggulan atau ekonomi basis akan digunakan alat analisis *Location Quotients*. Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Kuncoro, 2004).

Formula yang digunakan untuk analisis *Location Quotient* (SLQ) adalah sebagai berikut (Wagner, 2000);

$$LQ = \frac{e_{si}/e_i}{e_s/e}$$

di mana:

- e_{si} = nilai produksi subsektor s pada daerah kabupaten/kota
- e_i = total PDRB kabupaten/kota
- e_s = nilai produksi sektor s pada Propinsi Jateng
- e = total PDRB Provinsi Jateng

Kriteria hasil penilaian yang diterapkan adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004, dan Anonim, 2000):

1. $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat propinsi
2. $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat propinsi
3. $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sub sektor tertentu pada tingkat daerah kabupaten/kota sama dengan sektor yang sama pada tingkat propinsi

Jika suatu subsektor ekonomi memiliki nilai $LQ > 1$ dapat dikatakan bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dari daerah kota/kabupaten. Sebaliknya jika $LQ < 1$, subsektor tersebut bukan merupakan sub sektor unggulan.

Formula LQ tersebut bersifat statis atau *Static Location Quotients* (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak mampu melihat perubahan spesialisasi secara periodik. Model tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun ini masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun yang akan datang. Demikian pula, model tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul pada saat ini akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Pada analisis ini, nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada setiap periode tahun penelitian.

Cara lain untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun. Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu subsektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Alternatif lain dari metode ini salah satunya dikembangkan oleh Bank Dunia. Untuk menghasilkan nilai perubahan atau pertumbuhan LQ tersebut, Dinc (2002) menggunakan formula sebagai berikut:

$$\Delta LQ = \frac{LQ_{t+1} - LQ_t}{LQ_t}$$

Dinc (2002) menyatakan bahwa dari hasil LQ tersebut, subsektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Pada matriks di bawah ini, nilai LQ pada tahun terakhir mungkin akan besar dan terdapat kecenderungan meningkat, dimana hal ini merupakan situasi yang diharapkan (sel *D*). Jika nilai LQ besar tetapi mengalami penurunan sepanjang waktu, maka pengambil kebijakan perlu memberikan perhatian pada sektor ini (sel *C*). LQ dapat pula kecil dan meningkat atau menurun sepanjang waktu.

Tabel 1. Matriks Perubahan LQ

		Perubahan (U) LQ	
		Negatif	Positif
Nilai SLQ	Rendah	A	B
	Tinggi	C	D

Hasil penentuan kategori ini memberikan alat analisis yang penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi, karena setiap kategori akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbeda. Sebagai misal, suatu daerah akan berfokus pada subsektor ekonomi yang memiliki LQ tinggi. Jika nilai LQ subsektor tersebut mengalami penurunan maka akan berdampak menciptakan potensi masalah pembangunan ekonomi daerah. Demikian pula, jika LQ suatu sub sektor relatif kecil tetapi menunjukkan adanya pertumbuhan maka sub sektor ini perlu mendapat perhatian khusus. Jika suatu subsektor ekonomi memperlihatkan penurunan LQ, maka pemerintah daerah perlu mencari penyebabnya dan membuat program kebijakan yang dapat menghentikan penurunan LQ sub sektor tersebut atau paling tidak memperlambatnya.

Pada penelitian ini, kedua metode LQ tersebut digunakan. Data yang dipergunakan adalah data PDRB setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2000 sampai 2004, dengan harga konstan tahun 2000. Nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Nilai $\bullet LO$ yang dihasilkan adalah perbandingan antara nilai SLQ tahun 2000 dengan SLQ tahun 2004.

Terkait dengan metode yang digunakan, beberapa asumsi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data dengan rentang waktu 2000 – 2004 dianggap memiliki rentang waktu yang cukup untuk menunjukkan perubahan struktur perekonomian daerah.
2. Sub sektor ekonomi industri pengolahan ditentukan industri pengolahan tanpa minyak dan gas (migas). Hal ini karena rentang tahun 2000 sampai 2004, sub sektor ini memberikan kontribusi yang besar dan hanya terdapat di Kabupaten Cilacap saja. Karena itu, untuk tujuan kesebandingan data industri pengolahan antar kabupaten kota, maka sub sektor migas menjadi layak untuk dikeluarkan dari analisis.

Kabupaten dan kota merupakan dua daerah yang setingkat dan dapat dibandingkan. Dengan konsentrasi perolehan sumber-sumber PDRBnya yang relatif berbeda, ke dua bentuk daerah administratif ini perlu menjadi perlu dianalisis apakah konsentrasi perolehan tersebut menunjukkan perubahan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan setiap daerah cenderung menunjukkan perbedaan dalam potensi sektor-sektor ekonominya. Karena perbedaan sumbangan setiap sektor ekonomi pada daerah yang berbeda, sektor-sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah relatif berbeda dengan daerah lainnya. Demikian potensi sektoralnya untuk tetap unggul, terdapat perbedaan relatif antar kabupaten, antar kota maupun antara kabupaten dengan kota. Tabel 2 sampai 10 menunjukkan hasil pemetaan daerah dengan kategori tinggi/rendah SLQ dan digabungkan dengan kenaikan/penurunan Δ LQ.

Pada sektor pertanian, daerah kota cenderung menampilkan nilai LQ yang kecil dan semakin mengecil. Hal ini menunjukkan sektor pertanian di daerah kota semakin memudar perannya sebagai sektor yang mampu memberikan sumbangan yang besar bagi PDRB. Hanya Kota Tegal dan Kota Pekalongan yang terlihat memiliki LQ rendah dan cenderung meningkat nilainya. Daerah kabupaten dengan LQ pertanian rendah dan pertumbuhan LQnya negatif adalah Cilacap, Kendal, Semarang dan Tegal. Sebaliknya, daerah dengan potensi pertanian yang unggul (dengan LQ tinggi) dan semakin unggul (Δ LQ meningkat) adalah Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Boyolali. Daerah-daerah ini

memiliki potensi yang paling baik untuk pengembangan sektor pertanian lebih lanjut.

Pada sektor pertambangan dan penggalian, terdapat lima kabupaten yang menunjukkan LQ tinggi diikuti perkembangan LQ positif. Kabupaten ini adalah Banyumas, Cilacap, Kebumen, Kebumen dan Tegal. Kabupaten Klaten, Wonogiri, Jepara, Wonosobo dan Kota Semarang merupakan daerah dengan LQ yang rendah tapi mengalami pertumbuhan LQ positif. Sementara, daerah-daerah lain menunjukkan pertumbuhan LQ secara negatif. Upaya peningkatan hasil produksi pada sektor tambang dan penggalian relatif sulit dilaksanakan karena sifat dari produk tambang dan galian adalah exhausted resources. Pada sektor Industri pengolahan, dua kabupaten yang penting untuk menjadi fokus perhatian adalah kabupaten Jepara dan Kudus. Kedua daerah ini menunjukkan LQ yang tinggi tetapi memperlihatkan penurunan. Kudus terkenal dengan industri pengolahan tembakau menjadi rokok, sedangkan Jepara terkenal dengan industri pengolahan kayu menjadi furnitur. Sektor industri andalan Kudus dan Jepara ini memberikan kontribusi yang tinggi bagi ketersediaan lapangan kerja masyarakat daerah tersebut. Karena itu, pencarian sebab-sebab menurunnya peran sektor industri pengolahan serta penentuan kebijakan yang tepat perlu dilakukan (untuk penelitian lain).

Tabel 2. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pertanian

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Semarang, Kendal, Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang	Sukoharjo, Karanganyar, Kudus, Pekalongan, Kota Tegal, Kota Pekalongan
SLQ tinggi	Klaten, Wonogiri, Sragen, Pati, Banyumas, Batang, Pemalang, Banjarnegara, Purworejo, Magelang	Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Boyolali

Tabel 3. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pertambangan dan Penggalian

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Karanganyar, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Purbalingga, Kendal, Banjarnegara, Boyolali, Kota Surakarta, Kota Salatiga	Klaten, Wonogiri, Jepara, Wonosobo, Kota Semarang
SLQ tinggi	Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Temanggung, Batang, Pekalongan, Brebes, Purworejo, Magelang	Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Kebumen

Tabel 4. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Industri Pengolahan

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Grobogan, Rembang, Demak, Boyolali, Kebumen, Pemalang, Kota Pemalang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal.	Klaten, Wonogiri, Sragen, Blora, Pati, Banyumas, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Pekalongan
SLQ tinggi	Kudus, Jepara	Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang

Tabel 5. Nilai LQ dan Pertumbuhannya di Sektor Listrik, gas dan Air Bersih

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Grobogan, Rembang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Purworejo, Wonosobo	Klaten, Wonogiri, Blora, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Batang, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Boyolali
SLQ tinggi	Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Pati, Banyumas, Kota Semarang

Tabel 6. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Bangunan

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Wonogiri, Blora, Rembang, Demak, Kendal, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Boyolali	Cilacap, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, pati, Kudus, Banyumas, Jepara, Semarang, Batang, Tegal, Brebes
SLQ tinggi	Grobogan, Pekalongan, Banjarnegara, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Klaten, Temanggung, Purbalingga, Purworejo, Magelang

Tabel 7. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Batang, Pekalongan, Brebes, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Kota Salatiga	Sragen, Banyumas, Temanggung, Kendal, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal
SLQ tinggi	Klaten, Kudus, Boyolali, Kota Semarang	Cilacap, Pemalang, Tegal, Kota Pekalongan

Tabel 8. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Klaten, Blora, Grobogan, Pati, Demak, Kendal, Brebes, Boyolali	Karanganyar, Sragen, Kudus, Semarang, Batang, Pekalongan, Pemalang, Kebumen
SLQ tinggi	Sukoharjo, Banyumas, Jepara, Tegal, Purbalingga, Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Wonogiri, Rembang, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang,

Tabel 9. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Demak, Temanggung, Kendal, Brebes, Magelang, Kota Semarang	Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Kudus, Semarang, Batang, Pemalang, Purbalingga
SLQ tinggi	Kebumen, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Blora, Pati, Banyumas, Jepara, Pekalongan, Tegal, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali

Tabel 10. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Jasa-jasa

	U LQ negatif	U LQ positif
SLQ Rendah	Cilacap, Karanganyar, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Tegal, Brebes, Wonosobo	Sukoharjo, Pati, Kendal, Pemalang, Boyolali
SLQ tinggi	Grobogan, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Klaten, Wonogiri, Sragen, batang, Banjarnegara, Magelang, Kota Semarang

Pada sektor listrik, gas dan air bersih, sebagian besar daerah di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan LQ yang meningkat (positif), baik di daerah dengan LQ rendah maupun LQ tinggi. Hal ini menunjukkan sektor ekonomi ini semakin berperan dalam memberikan kontribusi peningkatan PDRB. Sebaliknya, yang perlu mendapat perhatian adalah beberapa daerah, terutama daerah berbentuk kota yang memperlihatkan LQ yang tinggi tetapi cenderung menunjukkan penurunan. Wilayah kota tersebut adalah Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan dan Tegal. Sektor listrik, gas dan air bersih di wilayah kota pada umumnya cenderung memberikan kontribusi yang lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Aktivitas ekonomi modern banyak memerlukan listrik dan gas. Demikian pula, penyediaan air bersih cenderung lebih terfokus di wilayah kota karena daerah kota relatif menunjukkan permasalahan pada rendahnya debit air yang dihasilkan tanah kota maupun kualitas air bersih dibanding dengan daerah kabupaten. Menurunnya peran sektor ini di wilayah kota akan

memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekonomi modern di perkotaan dan akan berdampak pula pada turunnya fungsi *amenities* lingkungan kota bagi masyarakat penghuninya.

Untuk sektor bangunan, daerah kota relatif lebih tinggi nilai LQ-nya dibanding daerah kabupaten. Meskipun demikian, daerah-daerah kota ini cenderung menurun nilai LQ-nya. Penurunan nilai LQ memberikan gambaran penurunan aktivitas ekonomi untuk sektor bangunan, misalnya untuk *real estate*. Penurunan LQ tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut mulai dianggap semakin kurang menarik sebagai tempat hunian maupun penentuan lokasi bisnis. Sebaliknya, sebagian besar daerah kabupaten menunjukkan pertumbuhan positif pada LQ-nya.

Untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel, mayoritas daerah menunjukkan LQ yang rendah, termasuk di antaranya adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Akan tetapi, tiga daerah kota ini menunjukkan perkembangan LQ positif. Tiga daerah dengan LQ

tinggi dan pertumbuhan LQnya positif adalah Cilacap, Pemalang, Tegal dan Kota Pekalongan. Meningkatnya peran sektor ini memberikan dampak positif, termasuk bagi pengembangan wisata di daerah tersebut. Sementara, daerah dimana sektor ini merupakan sektor unggulan tetapi menunjukkan perkembangan negatif adalah kabupaten Boyolali, Klaten, Kudus dan Kota Semarang.

Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, relatif terjadi pemerataan jumlah daerah yang menunjukkan perubahan LQ maupun besaran nilai LQ. Seluruh wilayah kota berada pada LQ yang tinggi yang berarti sektor ini masih menjadi sektor unggulan di daerah kota, dan sebaliknya sebagian besar daerah kabupaten menunjukkan LQ rendah.

Untuk sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa, seluruh daerah kota menunjukkan pertumbuhan LQ negatif. Penurunan nilai LQ ini memberikan identifikasi sektor keuangan persewaan dan jasa-jasa menunjukkan perkembangan yang lebih cepat pada beberapa daerah kabupaten daripada daerah kota.

KESIMPULAN

Analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan terdapat perbedaan relatif sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan antara daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten pada umumnya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, sementara daerah kota cenderung mengandalkan sektor pengangkutan dan transportasi, serta sektor listrik, air dan gas. Beberapa kota juga menunjukkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan, meskipun terjadi penurunan nilai LQ dari 2000 sampai 2004.

Beberapa daerah menunjukkan nilai LQ relatif rendah disertai penurunan nilai LQ. Jika kondisi ini terjadi di sektor penting dan vital bagi masyarakat, maka akan berdampak buruk dengan menurunnya aktivitas sektor ekonomi lain maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, jika sektor ekonomi tersebut merupakan sektor vital bagi daerah tersebut, misalnya sektor listrik, air dan gas di daerah kota, di mana 5 daerah kota menunjukkan nilai LQ tinggi, tetapi juga memperlihatkan tendensi LQ menurun. Pengambil kebijakan perlu mencari sebab penurunan sektor tersebut. Pemerintah perlu membuat program kebijakan untuk menghentikan penurunan LQ.

Dari temuan empiris, penelitian ini memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan:

1. Identifikasi sektor ekonomi yang tergolong unggul dan memiliki potensi unggul perlu menjadi perhatian utama. Pembangunan dan peningkatan aktivitas di sektor ini akan cenderung lebih mempercepat proses peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

2. Sektor ekonomi primer utama, yaitu sektor pertanian, di beberapa daerah kabupaten cenderung menunjukkan penurunan, yang ditunjukkan dengan penurunan nilai LQ. Karena sektor ini memberikan manfaat bagi sumber penghasilan mayoritas masyarakat, serta masih memberikan kontribusi penting bagi PDRB, maka pembangunan sektor pertanian perlu dilakukan lebih intensif, terutama di daerah kabupaten.
3. Menurunnya nilai LQ pada sektor listrik, gas dan air bersih di daerah kota dapat menjadi salah tanda dari penurunan kualitas amenities masyarakat kota. Upaya pencarian tambahan sumber energi dan air bersih yang layak bagi masyarakat kota merupakan langkah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, *Guide One - Economic Development Information System: Performing A Community Competitive Analysis*, Niagara Economic And Tourism Corporation, Canada
- Dinc, Mustafa, 2002, *Regional and Local Economic Analysis Tools*, The World Bank, Washington, DC
- Harris, T. R., Bonnenfant, B., Bartholet, R., Halbardier K., 2003, *An Updated Analysis of Retail Trade in Carson City, UCEK Technical Report, 2003-04-07*, University of Nevada, Reno
- Hendayana, R., 2003, *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional, Informatika Pertanian Volume 12 (Desember 2003)*
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M., Widodo, T., Sulistyaningrum, E., 2005, *Pembangunan Daerah kabupaten Sleman di Era Otonomi: Analisis Kebijakan dan Implikasinya Bagi Perencanaan jangka Panjang*, Kerja sama Pusat Studi Ekonomi & Kebijakan Publik UGM dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI, Maret 2005
- Maggioni1, M.A., Nosvelli, M., Uberti, T.E., 2007, *Space vs. Networks in The Geography of Innovation: A European Analysis, Papers in Regional Science*, August 2007.
- Wagner, 2000, *Regional Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion, The Journal of Regional Analysis and Policy* (2000)30:2